PERJUANGAN DIPLOMASI INDONESIA

AYU LESTARI
Nim 90100121069

KELAS : EKIS C
e-mail: ayulestari2727272727@gmail.com

1. PERJANJIAN LINGGARJATI

Dalam suasana di bulan November 1946 pihak Republik Indonesia dan pihak kolonial Belanda melaksanakan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini diberi nama Perjanjian Linggarjati karena dilaksanakan di daerah Linggarjati disebuah tempat yang sejuk dan tempat peristirahatan di daerah Selatan Kota Cirebon. Persetujuan Perjanjian Linggarjati tersebut yang ditandatangani secara sah pada tanggal 25 Maret 1947.pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhon dan van mook.

Hasil perundingan Linggarjati walaupun menuai pro dan kontra dikalangan elit tokoh revolusi, bila ditinjau secara holistik perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Indonesia mendapatkan pengakuan secara *de facto* walaupun masih dalam lingkup Jawa, Sumatera dan Madura dan disisi lain dengan terselenggaranya perjanjian Linggarjati, memuluskan langkah pemerintah kolonial untuk membentuk negara federal sesuai dengan yang telah lama dicita-citakan.¹

Adapun hasil dari perjanjian linggarjati adalah, *pertama* dalam pengakuan kedaulatan secara *de facto*. Belanda terhadap kedaulatan pemerintah Republik Indonesia dengan cakupan wilayah atas Jawa, Madura dan Sumatra, maka perlu adanya upaya dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Upaya tersebut seperti Upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda diselesaikan melalui jalur diplomasi dengan diadakannya Perundingan Linggarjati yang berlangsung tanggal 11-15 November 1946 yang dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah Naskah Perjanjian Linggarjati yang berisi 17 pasal yang kemudian dibawa masing-masing delegasi ke negaranya. Isi pokok Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut: (1) Pengakuan *de facto* Belanda terhadap kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatra, (2) Pembentukan¹Negara Indonesia Serikat(NIS), (3) Pembentukan Uni Indonesia Belanda. Meskipun mendapatkan perlawanan dari

¹. Irfan tasnur, Muhammad Rizal Fadli: *cendrasangkala; jurnal pendidikan sejarah dan sejarah* (2),58-67,201

². Agus Susilo' Ratna Wulansari: *jurnal pendidikan sejarah*, vol 10 (1):30-42, Februari 2021.
Perjanjian Linggarjati (diplomasi dan perjuangan bangsa Indonesia tahun 1946-1947)

pihak oposisi, namun akhirnya Perjanjian Linggarjati berhasil ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.²

Selain upaya perdamaian dengan pengakuan wilayah, aksi tembak menembak antara pihak Republik Indonesia dengan pihak kolonial Belanda dihentikan sementara waktu. Saat itu aksi tembak menembak sering terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Ketegangan antara pihak Indonesia dengan Belanda dihentikan setelah adanya Perjanjian Linggarjati. Sebelum berlangsungnya Perjanjian, pihak Indonesia dan Belanda juga telah menyetujui Perjanjian gencatan senjata yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana damai sebelum berunding. Pihak Indonesia, Perjanjian Linggarjati merupakan jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, sehingga Indonesia sangat antusias dalam upaya implementasi terhadap isi Perjanjian Linggarjati terutama yang membahas mengenai pengakuan kedaulatan RI. Selain menjalin Perjanjian dengan Belanda lewat Perjanjian Linggarjati, pihak pemerintah Republik Indonesia juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara di dunia agar kemerdekaan Indonesia dan negara Republik Indonesia mendapat pengakuan *de facto* Republik Indonesia.²

Kedua, Selain pengakuan *de facto*, ada juga hasil perjanjian linggarjati yang lain seperti dibentuknya negara indonesia serikat (RIS) Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia. RIS secara resmi terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Republik Indonesia Serikat (RIS) menyepakati hasil-hasil Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. RIS dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Soekarno dan sebagai Perdana Menteri ialah Mohammad Hatta. RIS mempunyai Undang-Undang yakni Konstitusi RIS. Sementara itu Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku pada negara Republik Indonesia yang statusnya hanya sebagai negara bagian RIS.⁴

Ketiga, pembentukan uni indonesia belanda. Uni indonesia belanda adalah bentuk kerjasama pemerintah RIS dan pemerintah belanda. Kerjasama ini berlangsung semenjak tahun 1949-1956 dengan tujuan memperbaiki hubungan bilateral (kedua belah negara) antara indonesia dengan belanda. Kerjasama ini dipimpin oleh seorang ratu belanda yang bernama ratu juliana. Indonesia memutuskan untuk membatalkan uni indonesia-belanda. tindakan Indonesia ini didasari pada undang-undang nomor 13 tahun 1956 tentang pembatalan hubungan Indonesia-netherland berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar. pembatalan KMB 1949 juga dipandang sebagai sikap Indonesia untuk keluar dari perangkap status quo Belanda soal irian barat. *keempat*, pemerintah RI akan memulihkan dan lindungi hak milik asing. Dan *Kelima*, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengurangi jumlah tentara kalau terjadi perselisihan dan akan diselesaikan oleh komite arbitrase.

2. AGRESI MILITER I

Pada tanggal 20 Juli 1947 yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda yang pertama, pihak Belanda melancarkan “aksi polisional” mereka yang pertama. Pasukanpasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan –gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan dalam Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang (Ricklefs,1989:339). Agresi Militer I di Sumatera dilakukan oleh belanda dengan menyerang pusatpusat pemerintahan dan pertahanan TNI di Medan, Bukit Tinggi, Palembang dan sejumlah kota lainnya. Berbeda dengan daerah lain, pada waktu Agresi Militer I kota Palembang telah dikuasai oleh Belanda, sedangkan kekuatan militer TRI-Subkoss berada di luar kota Palembang. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat antara Belanda dan para pemimpin di daerah ini setelah berakhirnya pertempuran 5 Hari 5 Malam. Oleh karena itu pertempuran berlangsung di luar kota Palembang.³

Pada agresi militer Belanda 1 separuh wilayah Jawa timur berhasil diduduki Belanda. Wilayah Jawa timur dibagi menjadi buah wilayah yang dibatasi oleh garis Van mook, sebagai garis demarkasi yang memisahkan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan de facto pemerintahan penduduk Belanda dan pemerintahan republik Indonesia. garis ini membujur dari bagian barat Gresik menuju ke selatan Mojoagung terus ke selatan menuju puncak gunung Arjuno, ninja ke gunung Kawi. Ke timur melalui sebelah selatan gunung katu, pakisaji, krevet Bululawang, tajinan, ngembal, nggak ke gunung Semeru. Ke selatan sepanjang kaligliding. Hingga ke pantai samudra Hindia. Dengan demikian seluruh karesidenan Besuki, sebagian karesidenan Malang dan sebagian karesidenan Surabaya berada di bawah pemerintahan pendudukan Belanda. Di bagian timur garis Van mook merupakan wilayah pemerintahan republik Indonesia yang meliputi karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro. Di sepanjang garis status quo pihak Belanda menempatkan KL (koninklijke leger),KM(koninklijke marine), dan barisan Cakra (barisan tentara dari Madura). Hal ini membuat wilayah Indonesia menjadi lebih sedikit dan sempit.⁴

Pada tanggal 14 agustus 1947, sultan syahrir dan haji agus salim diberi izin untuk pertama kali membeberkan keterangan tentang keadaan indonesia di sidang dewan keamanan pbb. tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah bagi indonesia di dunia internasional terutama dalam sidang pbb.

³. Jurnal: *Perjuangan rakyat organ komering ulu pada masa revolusi fisik 1945-1949: sriwijaya university 2021.*

⁴. Jurnal: *Negara Jawa timur 1948-1950: persaingan elite dan perlawanan rakyat terhadap negara Jawa timur*

Dengan penguasaan bahasa yang baik struktur bahasa yang tersusun rapi, kecakapan berbicara serta penyampaian yang lugas dan rasional tentang kebobrokan kebijakan politik belanda di indonesia dari haji agus salim, maka semakin banyak negara-negara yang simpati terhadap perjuangan indonesia. haji agus salim memberi pidato yang mengubah banyak pendapat dan pandangan wakil negara yang sebelumnya percaya begitu saja pada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan belanda.

Menurut sultan syahrir, pada agustus 1947 di dalam sidang dewan keamanan pbb, sedang terjadi perdebatan agresi militer belanda 1 atas wilayah indonesia, berkat ketangkasan dan diplomasi haji agus salim di lake succés, maka pandangan dunia khususnya mereka terhadap indonesia yang pada awalnya bersikap dingin berubah menjadi simpati untuk membantu perjuangan Indonesia.

Sultan syahrir dan haji agus salim dapat menyangkal semua pernyataannya menyebutkan dari pihak belanda. mereka dapat menunjukkan bahwa indonesia pantas untuk merdeka karena indonesia telah memiliki syarat-syarat yang mutlak sebagai syarat berdirinya sebuah negara. Indonesia telah memiliki pemerintahan, rakyat, undang-undang dan wilayah. Indonesia adalah negara yang sah. mereka menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dan pelatihan diakibatkan dari agresi militer belanda yang terjadi 21 juli 1947 adalah penjajahan atas negara indonesia yang melanggar kode etik kemanusiaan.

Sejak peristiwa itu, protes, kritik dan reaksi yang keras dan negara lain bermunculan. hal ini menunjukkan bahwa indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara di asia dan afrika bahkan beberapa dari negara itu telah mengakui kedaulatan indonesia. Setelah penjelasan yang dipaparkan oleh sultan syahrir dan haji agus salim ini, Akhirnya dewan keamanan pbb menyetujui untuk membentuk komisi tiga negara (ktn) karena di mata dewan keamanan pbb, ada adanya republik indonesia dipandang sebagai sengketa internasional dan ditakutkan menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. akhirnya dewan keamanan memutuskan apa agar belanda dan indonesia memilih negara ketiga untuk menjadi perantara dalam penyelesaian sengketa.

kabinet amir syarifuddin atas usul haji agus salim meminta agar australia bersedia menjadi komisi tiga negara (ktn), sedangkan belanda memilih belgia sebagai negara ketiganya. setelah itu pihak australia dan belgia menunjuk amerika serikat sebagai negara pengguna dari ktn.

Melalui perantara komisi tiga negara (australia, amerika serikat dan belgia), pertikaian antar indonesia belanda dapat ditengahi. hal ini menyebabkan terlaksananya konferensi meja bundar den haag belanda pada tahun 1949. konferensi meja bundar berakhir pada 27 desember 1949 dengan tercapainya pengakuan belanda terhadap kedaulatan indonesia. Dengan pembentukan ktn, maka langkah indonesia dalam merasakan iklim kedaulatan sudah semakin dekat.⁸

PERJANJIAN RENVILLE

Upaya untuk menyelesaikan masalah di agresi militer 1 tidak luput dari bantuan australia, yang pada saat itu pada tanggal 21 juli 1947 australia langsung memberitahu indonesia untuk mengajukan banding ke skjen pbb setelah memperhatikan peringatan yang diberikan oleh inggris untuk indonesia. Menanggapi himbauan dari australia tersebut, pemerintah indonesia mengambil sikap cepat dan tepat sehingga pada tanggal 22 juli 1947 Sjarifuddin secara terbuka mengundang menteri luar negeri australia, evatt untuk ikut campur tangan dalam menangani masalah dalam

⁵. *Historia A : jurnal pendidik dan peneliti sejarah, vol II No.2 (April 2019). "Diplomat dari negeri kata-kata (diplomasi haji Agus Salim pada inter Asian relation conference dan komisi tiga negara)*

agresi. Evat berencana membuat permasalahan tersebut ke dewan keamanan pbb. Tindakan evatt ini didukung oleh perdana menteri australia pada waktu itu. ketika masalah indonesia diterima masuk ke dalam agenda dewan keamanan pbb pada tanggal 30 juli 1947, australia menyerahkan rancangan resolusi yang menyerukan agar semua pihak menghentikan berbagai tindak kekerasan dan menyerahkan masalah persenjataan kepada arbitrase. akhirnya pada tanggal 1 agustus 1947 dewan keamanan pbb memerintahkan kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak. pada tanggal 4 agustus 1947 pemerintah indonesia rom belanda menghubungkan berhentinya tembak menembak dengan pengumuman tersebut berakhirlah agresi militer belanda 1.⁵

Akhirnya, tanggal 4 November 1947 proses perundingan antara kedua belah pihak dilaksanakan di atas sebuah kapal angkatan laut Amerika, renville. Dan pada saat itu juga pembicaraan resmi antar anggota mulai dilakukan. di atas kapal tersebut yang berlabuh di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947 geok melanjutkan pembahasan mengenai penyelesaian politik atas konflik antara Indonesia dengan Belanda. dalam hal ini Australia mengajukan suatu rancangan dengan usul agar kedaulatan segera diberikan kepada pemerintah republik Indonesia dan menyediakan hak protokoler bagi Belanda untuk kepentingan ekonomi dan pertahanannya. Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir widjoyoatmodjo seorang Indonesia yang memihak Belanda.¹⁰

pada sidang tanggal 9 Desember 1947 KTN mengajukan sebuah skema persetujuan kepada delegasi Belanda dan Indonesia untuk disetujui sebagai garis demarkasi efektif, yang beris usulan supaya pihak Belanda mengosongkan berbagai daerah yang diduduki dan sebaliknya tentara Republik mengosongkan seluruh " daerah kantong" yang diduduki. Pihak Belanda menolak skema KTN . mereka mengajukan usul lain, yaitu garis demarkasi berdasakan " garis van Mook" yang disahkan pemerintahan Hindia Belanda tanggal 5 September 1947. Usul tersebut ditolak dan dikritik secara pedas oleh Delegasi Republik.⁴

Dalam keadaan memuncak, pada tanggal 9 januari 1948, Belanda mengajukan ultimatum, jikalau Republik menolak maka Belanda menganggap dirinya tidak terikat lagi pada perintah gencatan senjata dan aan meneruskan aksi militernya ke yogya. Untuk kesekian kalinya KTN berusaha membujuk Republik, supaya mau menerima tuntutan Belanda. Sementara itu mereka menyakinkan Republik, bahwa penerimaan itu sama sekali tidak akan melemahkan Republik, tetapi justru akan memperkuat posisinya di forum Internasional.

Dalam kesadaran itulah pemerintah Republik menyetujui bujukan KTN untuk menerima " garis van Mook" menjadi garis demarkasi efektif, sehingga dapatlah ditandatangani dua perjanjian *Renville* masing-masing pada tanggal 17 Januari 1948 dan pada tanggal 19 januari 1948, yang antara lain berisi: " Perjanjian Gencatan Senjata, 12 Dasar-dasar perundingan Politik."¹¹

Tanggal 13 Januari 1948 van Mook meresmikan berdirinya Dewan Sementara Indonesia Serikat. Dalam kata pengukuhanannya van Mook menyebut, bahwa pada pokok dewan itu bertugas untuk segera mempersiapkan pembentukan Pemerintahan Indonesia Serikat Sementara. Dperingatkan, bahwa pembentukan tersebut sangat dipengaruhi oleh keinginan rakyat di daerah-daerah. Oleh sebab itu harus diusahakan, supaya di daerah-daerah dapat dibangun keamanan dan ketertiban, supaya penduduk dapat secara leluasa menentukan bentuk pemerintahan yang mereka inginkan. Pada akhirnya van Mook menyatakan harapan, bahwa dalam waktu dekat Republik juga mau menggabungkan diri dalam badan ini, sehingga dapat dicapai suatu perserikatan yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

6. Jurnal ilmiah guru "COPE" No. 01/tahun III/Mei 1999. "peran Australia dalam penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda melalui perundingan renville" hal 21

7. Jurnal: *Pemikiran Muhammad Natsir Dalam Memperjuangkan kembalinya RIS Ke NKRI 1945 1951*

3. AGRESI MILITER II

Dengan berakhirnya pemberontakan PKI, pimpinan Angkatan Perang mulai memikirkan kembali mengenai kemungkinan serangan militer Belanda. Berdasarkan perkiraan keadaan setelah diterimanya Persetujuan *Renville*, Belanda berusaha mengepung Republik Indonesia, secara politis, ekonomis dan militer. Gejala-gejala akan datangnya suatu serangan militer telah dirasakan oleh pimpinan Angkatan Perang, sejak Belanda mencoba mengulur waktu mengenai perundingan pelaksanaan Persetujuan *Renville*. Di beberapa tempat tentara Belanda melakukan pemindahan pasukan ke dekat garis demarkasi.

Akhirnya persetujuan *Renville* dibatalkan, kabar pertama pembatalan persetujuan *Renville* di Yogya berupa serbuan Belanda pada 19 Desember 1948 jam 5.30 pagi. Penyerangan dilakukan dengan pengeboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya, seperti RRI. Lalu diikuti dengan penerjunan 900 pasukan payung dan kemudian kesatuan-kesatuan lain. Pasukan Belanda yang dikirim ke Yogya pernah mendapat latihan KKO-AS di Virginia, jadi bukan sembarang tentara. memasuki Yogya mereka dibantu oleh KNIL, pasukan Belanda terdiri dari orang-orang pribumi. Tentara Belanda kemudian menawan Presiden dan Wakil Presiden, Syahrir (Penasehat Presiden) sejumlah menteri termasuk Menlu Agus Salim. Tetapi sebelum mereka ditawan, presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan negara kepada Menteri kemakmuran Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintahan darurat RI (PDRI).⁶ kendati surat munda tersebut kabarnya tidak sempat dikabarkan karena hubungan telekomunikasi keburu jatuh ke tangan Belanda, naskah nya dalam bentuk ketikan sempat beredar di kalangan orang "republikan". Namun untungnya saat itu republik berada dalam keadaan koma, Mr. syarifuddin prawinegara selaku menteri kemakmuran yang sedang bertugas di bukittinggi dengan sigap menanggapi krisis itu lewat rapat darurat sore hari tanggal 19 desember 1948, beberapa jam setelah sidang kabinet di jogja. Selama kurang lebih 8 bulan keberadaannya (Desember 1948 - juli 1949), pdri berhasil menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan alternatif dalam suasana pengungsian. Sesuai dengan sifatnya pdri memimpin pemerintahan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sambil meneruskan perjuangan dengan gerilya. syarifuddin prawinegara dalam posisinya sebagai ketua PDRI yang memimpin kabinet pdri, juga bertugas sebagai pemimpin roda pemerintahan di bidar alam dan mengadakan kontak-kontak dengan Pemimpin Pdri Di Jawa termasuk jenderal sudirman yang ditunjuk sebagai panglima besar Jenderal Soedirman berangkat ke luar kota untuk memimpin Perang Gerilya. Jenderal Soedirman memimpin gerilya dengan berpindah-pindah tempat. Perjalanan Jenderal Soedirman dalam bergerilya melalui beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi rute perjalanan Jenderal Soedirman yaitu Pacitan. Saat berada di Pacitan inilah Jenderal Soedirman dan rombongan menetap dengan kurun waktu yang lama. Kedatangan rombongan pasukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman ke Daerah Pacitan melalui Desa Sukorejo, yang sudah masuk ke dalam daerah Kecamatan Sudimoro. Jenderal Soedirman dalam memimpin Perang Gerilya telah mewujudkan kepemimpinannya sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. Banyak dikeluarkan perintah-perintah dan diterima laporan-laporan. Instruksi-instruksi dan hubungan dapat berjalan dengan lancar karena bantuan dari rakyat yang meyakinkan. Tidak hanya itu, konsolidasi pertahanan rakyat semesta dimantapkan. Semangat perjuangan prajurit dan rakyat lebih dikobarkan. Jenderal Soedirman menetap di Dusun Sobo sampai tanggal 7 Juli 1949. Resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 memuat beberapa poin penting untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Yang paling penting tentu saja adalah bahwa Belanda wajib segera menghentikan semua aksi militernya di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap Belanda. Selain itu, DK PBB memerintahkan kepada Belanda untuk membebaskan semua tawanan politik, termasuk para petinggi pemerintahan RI, dan membebaskan mereka dalam untuk kembali menjalankan tugasnya. Poin penting ketiga yang

termaktub dalam Resolusi 67 DK PBB adalah dibentuknya United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Komisi bentukan PBB pengganti KTN ini diberi wewenang yang lebih luas untuk Menghasilkan perdamaian menghasilkan antara Belanda dan Indonesia.⁷

4. PERSETUJUAN ROEM ROYEN

Mohammad Roem dan Dr. J.H. van Roijen merupakan dua nama wakil delegasi antara Indonesia dan Belanda yang menandatangani sebuah persetujuan yang diwakili oleh KTN (Komisi Tiga Negara) diantaranya Belgia sebagai wakil dari Belanda, Australia sebagai wakil dari Indonesia, dan Amerika sebagai penengah antara keduanya. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, maka akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan, yang kemudian dikenal dengan nama "*Roem-Royen Statements*". Pada awalnya Persetujuan Roem-Roijentersebut ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian besar kalangan politisi maupun petinggi militer dari kedua belah pihak (Republik Indonesia dan Belanda),keduanyasama-sama berasumsi bahwa jika menerima hasil Perundingan Roem-Roijen berartimenerima suatu kekalahan. Namun demikian, akhirnya baik pemerintah Belanda maupun pihak R.I.mau menerima hasil persetujuan tersebut.Adapun inti dari Persetujuan Roem-Roijen adalah Indonesia akan hentikan perang gerilya dan ikut dalam kmb di Den Haag.

dengan berbagai macam pertimbangan serta melihat hubungan antar kedua negara yakni Belanda dan Indonesia yang sudah semakin tidak harmonis lagi maka pada gilirannya dewan keamanan LBB mendesak pemerintah Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pihak republik Indonesia agar permasalahan kedua belah pihak dapat berakhir. atas dasar resolusi tersebut maka akhirnya konflik bersenjata antara pemerintah republik Indonesia dengan pihak Belanda dapat segera diakhiri melalui jalur diplomasi, yakni dengan digelarnya perundingan roem-royen pada tanggal 14 April 1949,dimana dari pihak Indonesia dipimpin oleh mister Muhammad Rohim dan dari pihak Belanda oleh Dr.JH Van royen atas prakarsa UNCI (united nations commission for Indonesia) . pada saat itu atas anjuran pihak untuk diadakan pertukaran pernyataan yang disebut dengan Van roijen room statement atau persetujuan Roem royen mengenai penyerahan daerah ibu kota Yogyakarta kepada pemerintahan republik Indonesia. sehingga kembalinya kekuasaan pemerintahan republik Indonesia ke ibu kota Yogyakarta adalah suatu realitas yang pada gilirannya dapat memulihkan kembali sistem keamanan, ketertiban dan perdamaian di seluruh tanah air Indonesia.

5. PERSETUJUAN MEJA BUNDAR (KBM)

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag. KMB dimulai dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda guna mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat. Penyerahan kedaulatan atas Indonesia oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 meninggalkan keresidenan Irian Barat sebagai daerah sengketa. Hal ini diatur dalam piagam penyerahan kedaulatan pasal 2 dokumen KMB. Konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat dimulai dari KMB. Dalam KMB dinyatakan bahwa pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia, tidak termasuk Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam suatu perundingan Uni Indonesia-Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Semestinya pada akhir tahun 1950, Belanda sudah mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia tetapi setelah KMB, penyelesaian sengketa Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tetap mempertahankan Irian Barat, maka sejak 1949 Irian Barat merupakan wilayah persengketaan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat maka dilakukan diplomasi, tetapi tidak membuahkan hasil

kemudian dilanjutkan dengan militer yang menghasilkan Perjanjian New York. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Badan Peralihan Sementara PBB yaitu United Nation Temporary Executive Authority. Konflik diakhiri dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menyatakan bahwa penduduk Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konferensi Meja Bundar telah selesai dilaksanakan, dalam bidang politik ada ikatan Uni dalam hubungan Indonesia-Belanda. Hal ini menjadi perdebatan diantara pejabat Indonesia. Hatta menerangkan Uni hanya sebagai lambing, ratu Belanda sekedar mempunyai kedudukan seremonial di dalamnya. Ini berbeda dari perjanjian Linggarjati yang menentukan bahwa keputusan Uni diambil “atas nama ratu”. Uni yang sekarang merupakan forum kerjasama buka superstaat (negara di atas negara).

Sebelum KMB ditutup masalah utang masih sulit diselesaikan. Menurut Belanda, semua utang pemerintahannya harus diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat pada saat penyerahan kedaulatan. Belanda menginginkan hanya utang luar negeri yang dapat dirundingkan dan utang dalam negeri sepenuhnya merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia mendatang. Delegasi Indonesia (baik Republik maupun Federasi) menolak keinginan Belanda tersebut. Delegasi Indonesia hanya mengakui utang Hindia-Belanda sampai saat menyerahnya Jepang pada bulan Maret 1942. Para delegasi Indonesia menolak untuk menanggung biaya-biaya langsung maupun tidak langsung yang terjadi karena Aksi Militer Belanda melawan Republik Indonesia.

Dengan diajukannya usul balasan Indonesia, Perundingan menjadi gagal sehingga delegasi Belanda mengajukan pendapat bahwa penyerahan kedaulatan tidak dapat dilakukan berdasarkan masalah ini, karena hal itu pihak Indonesia akhirnya menyetujui untuk membayar sejumlah utang, delegasi Indonesia menyadari hal tersebut sebagai harga dari suatu penyerahan kedaulatan. Setelah terjadi tawar-menawar, Indonesia hanya mengakui utang sebesar f. 3.400 juta gulden. Terakhir hasil dari konferensi meja bundar adalah RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

Setelah berbagai macam perundingan-perundingan telah dilakukan antara RIS dan RI, akhirnya tercapailah kesepakatan bersama untuk membentuk Negara Kesatuan. Demi tercapainya secara cepat untuk membentuk Negara Kesatuan, RI ikhlas untuk meleburkan diri kedalam RIS.

“ Panitia bersama ini diketuai oleh Prof. Soepomo dan sebagai acuan kerja digunakan salah satu ketentuan yang tercantum dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan RI tertanggal 19 Mei 1950 yang antara lain berbunyi:

- 1. UUD Negara Kesatuan dapat dengan mudah mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa, sehingga esensi UUD RI antara lain: Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 33. Ditambahkan dengan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS yang termasuk didalamnya.*
- 2. Di UUDS Negara Kesatuan diadakan pasal yang memuat pokok pemikiran “hak milik itu adalah suatu fungsi sosial”.*
- 3. Selanjutnya diadakan perubahan-perubahan dalam konstitusi sementara, antara lain: a. Senat dihapus.*
 - b. DPR sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.*
 - c. DPR sementara bersama KNIP dinamakan Majelis Perubahan UUD, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam UUD baru.*
 - d. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum.*
 - e. Presiden ialah Presiden Soekarno.*
 - f. Dewan Menteri harus bersifat Kabinet Parlementer.*
 - g. Tentang jabatan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan*

4. *Sebelum diadakan perundang-undangan Kesatuan, maka UU dan peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, akan tetapi dimana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan RI berlaku.*
5. *Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.*

Persetujuan yang telah disepakati dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terpilihlah kembali Soekarno sebagai Presiden NKRI dan Wakil Presiden dipilihlah Mohammad Hatta. Dan UUDS secara resmi telah disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang telah melaksanakan perundinga.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, naskah UUDS RI ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950 ditetapkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Konstitusi NKRI selanjutnya dikenal sebagai UUD Sementara RI tahun 1950 disingkat UUDS 1950.